BAB III

GAMBARAN UMUM PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)

A. Proses Lahirnya Pelajar Islam Indonesia

Pada saat Partai Keristen meraih kekuasaan pada pemilu Belanda tahun 1901 di Belanda, Ratu Wilhelmina dalam pesan tahunannya mengenai "Utang Budi" dan tanggung jawab Etis Belanda kepada rakyat Hindia yang disampaikan dihadapan Dewan Parlemen Kepala Hindia kemudian dikenal dengan sebutan "*Politik Etis*" yang kemudian digerakan oleh Van Deventer.[1] Keadaan ini juga telah mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa Hindia Belanda tidak lagi sebagai *Wingewest* (daerah yang menguntungkan), tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi segala keperluannya, dan budaya rakyatnya ditingkatkan. Salah satu jalan untuk mencapai tujuannya adalah dengan memberikan pendidikan barat secara lebih intensif.[2]

Dalam Politik Etis semangat yang dibangun adalah bentuk tanggung jawab moral Kolonial Belanda terhadap negeri jajahan Hindia, misalnya saja dalam bentuk pendidikan. Misi utamanya adalah untuk kembali mensejahterakan masyarakat pribumi menjadi lebih layak dan menginginkan

[1]Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuas;Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: mizan,2005), p.81.

[2] Nina H. Lubis, Banten Dalam Pergumulan sejarah:sultan, ulama, jawara (Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), p.131.

lahirnya kembali Hindia salah satunya melalui sistem pendidikan yang diadopsi dari Barat.

Salah satu kebijakan Politik Etis Kolonial Belanda berdampak sangat signifikan terhadap umat Islam. Belanda mempunyai sudut pandang bahwa Islam merupakan sebuah kekuatan yang dapat mengancam berbagai bentuk kebijakan penjajahan yang ada di Indonesia. Ajaran Islam memberikan pandangan dalam kehidupan sosial melalui doktrin keagamaannya melalui *Amar ma'ruf* dan *Nahyi munkar* yang memiliki dimensi revolusioner[3]. Dalam ajaran Islam menyeru pemeluknya untuk melaksanakan perintah Agama seperti *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar* yaitu untuk selalu melakukan tindakan yang baik dan mencegah dari hal yang mungkar.

Belanda melihat bahwasanya Islam-lah yang paling besar kemungkinannya dalam menentang segala kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Belanda, termasuk eksploitasi yang mereka lakukan terhadap Bangsa Indonesia. Dalam hal ini kecurigaan Belanda memang tidak salah, dan sangat beralasan, karena pada hakekatnya ajaran Islam memang suatu revolusi yakni revolusi dalam menghapuskan dan menentang segala bentuk ekploitasi seperti, fasisme, komunisme, imperialism termasuk kolonialisme.

Rasa kehawatiran dari orang-orang Belanda terhadap Islam semakin besar mengingat Pemerintahan Belanda menyadari bahwa ajaran Islam yang

[3] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 48-49.

revolusioner akan mengancam Belanda sewaktu-waktu, akan tetapi kehawatiran itu kemudian dapat di luruskan dan diatasi berkat seorang ahli Arab dan Islam yang bernama Christian Snouck Hurgronje, menjelaskan dan melakukan pemetaan terhadap orang Islam yang sekaligus mengkritik asumsi-asumsi dari Pemerintahan Belanda terhadap orang Islam. Christian Snouck Hurgronje kemudian memberikan penjelasan bahwa Islam yang berada di kepulawan Hindia memiliki sifat atau watak damai, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya tentang bahaya yang cukup signifikan dari kelompok-kelompok kecil kalangan ulama fanatic yang terpengaruh oleh gagasan Pan-Islamisme.

Christian Snouck Hurgronje dengan berbagai pertimbangan mengajukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terhadap Islam dalam suatu kerangka kerja yang disebut "*Splitsingstheorie"* yang membagi Islam menjadi dua bagian, *Pertama*, yaitu Islam yang bersifat keagamaan, dan yang *Kedua,* Islam yang bersifat politik. Christian Snouck Hurgronje memandang Islam yang bersifat keagamaan tidak berbahaya dan pemerintah Belanda harus menghormatinya, tetapi untuk bagian Islam yang bersifat politik harus disikapi secara tegas dan dihadapi dengan kekuatan sejak awal-awal kemunculannya.[4]

[4]Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuas…* p.82.

Menurut H.Aqib Suminto,[5] Pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan tiga jenis kebijakan terhadap Islam, *Pertama,* kebijakan netral Agama. Dari kebijakan ini pada awalnya Pemerintah Belanda mempromosikan organisasi pendidikan bersekala luas diatas landasan nilai-nilai universal dan bersifat netral secara keagamaan. Akan tetapi dalam perjalanannya kebijakan tersebut lebih mendorong para pelajar Islam dari kalangan bumiputra untuk menjauhkan dirinya dari ajaran Islam. *Kedua*, politik Asosiasi Kebudayaan. Dalam kebijakan ini ada sebuah dorongan kuat dari Pemerintah Belanda untuk menciptakan "sebuah negara Belanda Raya". Artinya dalam bidang sosial dan kehidupan, pemerintah Belanda menghendaki agar para pelajar Islam dari kalangan bumiputra sejajar dan seirama dengan kebudayaan Belanda, dengan jalan yang ditempuh melalui pemanfaatan dan asosiasi pendidikan.

Dibalik kebijakan pemerintah Belanda yang merupakan pendidikan sekuler di bawah bendera politik etis, ternyata mempunyai misi kristenisasi. Usaha tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan sistem pendidikan modern ala Barat kepada masyarakat. Sekolah dijadikan sebagai sarana untuk menyebarluaskan injil dan menarik pengikut Kristen baru dengan menjanjikan keuntungan-keuntungan bagi pengikut barunya. Seperti yang diungkapkan oleh Gavin W, Jones, "Menjadi Kristen, juga berarti

[5] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 49.

terbaratkan, dan pendidikan merupakan bagian integral dari westernisasi",[6] kondisi semacam itu mematahkan kebijakan politik netral Agama yang dicetuskan pleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Masyarakat pribumi yang berasal dari kalangan bangsawan Muslim, pedagang muslim dan keluarga yang masih taat dan kuat agamanya, lebih memilih untuk mempertahankan teradisi dan keyakinannya dengan cara mengirim anak-anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah Islam tradisional (seperti pesantren, surau, meunasah, dayah), atau ke pusat-pusat belajar Islam di Timur Tengah.

Jepang yang mengambil alih komando penjajahan di bumi Indonesia. Menyebabkan adanya tekanan-tekanan terhadap kemurnian Aqidah oleh pemerintahan Jepang, terutama karena adanya keharusan melakukan *Sekerei*, maka umat Islampun gencar melakukan pendalaman aqidah dengan cara melakukan shalat fardhu berjamaah.[7] Akhir dari penjajahan Belnda disambut dengan antusisme masyarakat bumiputra. Akan tetapi apakah dengan masuknya Jepang di Indonesia maka segala permasalahan yang telah diwariskan hilang, tentu tidak demikian. Malah selama penjajahan baru yang dilakukan Jepang pada kurun waktu 1942-1945 membawa cerita baru, terutama bagi kalangan Islam.

---

[6] Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuas…* p.87-88.
[7] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 56

Proses masuknya Jepang menduduki Indonesia sebagai penjajah kala itu mendapatkan simpati dan harapan dari masyarakat karena dapat mendekatkan diri dengan penduduk Indonesia melalui propaganda 3A, yaitu (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia), yang kemudia lambat laun dalam perjalanannya berubah menjadi antipati. Hal tersebut diakibatkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang terlalu otoriter bagi kelangsungan keyakinan masyarakat Indonesia.

Ada tiga langkah dan kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang sehingga membuat rakyat Indonesia menarik simpatinya kembali, yaitu: *Pertama,* segera setelah berkuasa, Jepang memasukan kehendak untuk merubah corak kebudayaan rakyat Indonesia. Semua sekolah harus bercorak Jepang dan yang tidak mematuhi akan dilarang kegiatannya. *Kedua,* Jepang melaksanakan kerja paksa (*romusa*) dan menjerat kaum perempuan Indonesia menjadi budak sex bagi tentara Jepang. *Ketiga*, Jepang mewajibkan krepada rakyat Indonesia untuk melakukan *sekere* yakni menyembah *Tenno Heika* (Kaisar Jepang) setiap pagi dengan cara menghadap kearah negeri Jepang.[8]

Melihat perlakuan Jepang yang semula memberi harapan akhirnya masyarakat sadar, terutama umat Islam berkesimpulan bahwa bangsa berkulit kuning itu tidak kalah jahatnya dengan bangsa Belanda. Secara internal umat Islam mengalami berbagai masalah yang yang serius sehingga harus

[8] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 51-52.

diselesaikan secepatnya. Perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam dari sejak dulu terutama perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah di Indonesia. Perjuangan itu kemudian berkembang sebagai Komunitas Politik berbasis Islam, hal ini ditandai dengan munculnya organisasi Syarikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Munculnya ketiga organisasi itu digolongkan sebagai fase ideologis yakni saat adanya elaborasi berbagai pandangan tentang negara islam dan perjuangan ideologis pada masa pendudukan Jepang.[9]

Pendirian organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dimotivasi oleh dua hal yaitu: *Pertama*, motivasi ke-Islam-an. *Kedua*, motivasi kebangsaan. Kemudian yang menjadi faktor pendorong berdirinya PII yaitu diakibatkan oleh dualisme sistem pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia yang merupakan warisan dari negara penjajah, Belanda dan Jepang.

Kebijakan politik Belanda dan Jepang terhadap umat Islam dan Bangsa Indonesia sangat berpengaruh kepada generasi muda, utamanya para pelajar. Akibat politik-asosiasi, misalnya, banyak pelajar Indonesia yang mendapat pendidikan kurikulum Belanda. Gaya pendidikan inilah yang memicu perbedaan antara pelajar produk Belanda dengan pelajar hasil

[9] Hanan, *Gerakan Pelajar ...,* p. 53

pendidikan tradisional di Indonesia yang mengutamakan pendidikan pesantren.[10]

Para pelajar produk Barat umumnya memiliki pandangan dunia yang lebih luas terutama berkenaan dengan dunia Barat. Akibatnya pola hidup yang dijalani lebih cenderung meniru gaya hidup orang Barat baik dari budaya berpakaian, bersikap bahkan tingkah laku sehari-hari. Dampak dari gaya hidup tersebut adalah bukan hanya berbudaya secara pribadi yang meniru orang-orang Barat. Efek yang paling terasa adalah cara pandang dan rasa keagamaannya mulai menipis seiring dengan perubahan cara berfikir dan cara menyikapi Agama. Pandangan tersebut diorientasikan pada dunia, bukan pada Tuhan (agama) yang berorientasi pada akhirat.

Sistem pendidikan berbasis kurikulum Belanda tidak hanya bersifat negatif, namun juga memiliki sisi fositif yang dapat dipetik dari hasil pendidikan Belanda, salah satunya adalah metode yang modern, karena memakai kurikulum dan kelas. Metode ini dapat memberikan keteraturan dan kedinamisan, sementara sisi negatifnya adalah merosotnya rasa patriotism dan masuknya paham sekulerisme ke dalam pikiran para pelajar, hasilnya para pelajar yang mengenyam pendidikan di sekolah umum hanya

[10] Djayadi Hannan, *Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-bayang Negara ; Study Kasus Pelajar Islam Indonesia tahun 1980-1990* (Yogyakarta: UII Press, 2006), p.54.

mendapatkan pekerjaan rendah saja seperti menjadi para pekerja bagi pemerintahan kolonial Belanda.[11]

Sistem pendidikan pesantren dan umum lambat laun memicu dikotomi[12] dalam dunia pendidikan sekaligus menjadi penyebab adanya jurang pemisah antar pelajar yang mengenyam pendidikan di pesantren dan pelajar yang mengenyam pendidikan di sekolah umum. Hasilnya para pelajar didikan Belanda merasa canggung untuk bersosialisasi dengan pelajar dari pesantren dan masyarakat Islam. Padahal, pelajar yang basic pendidikannya umum juga merupakan muslim.

Situasi yang berlarut-larut seperti ini menimbulkan banyak kehawatiran dari berbagai kalangan, menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan karena akan mengakibatkan cacatnya pertumbuhan negara Indonesia dari berbagai bidang terutama terhambatnya penyebaran ajaran Islam di dunia pendidikan. maka dicarilah kemudian solusi untuk menyatukan kembali pemahaman antara dua kutub pelajar sebagai sesama muslim. Hal ini juga kemudian yang menjadi salah satu faktor pendirian organisasi Pelajar Islam Indonesia.

Seorang pelajar di STI Yogyakarta yang bernama Yoesdi Ghozali memiliki keinginan yang sangat kuat dalam membentuk sebuah organisasi yang mewadahi kalangan pelajar. Saat itu sudah ada sebuah organisasi yang

[11] Hanan, Gerakan Pelajar …, p.55

[12] Pembagian atas dua kelompok yang bertentangan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

menampung kalangan pelajar yaitu Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yang berdiri pada tanggal 27 September 1945, akan tetapi adanya organisasi ini hanya bersifat umum atau tidak mewakili para pelajar Islam dan terindikasi didominasi aktivis sayap kiri.[13]

Hasrat yang kuat untuk mendirikan wadah gerakan pelajar tersebut dimulai ketika Yoesdi Gozali beri'tikaf di Masjid Besar Kauman Yogyakarta tanggal 25 Februari 1947. Saat itu terlintas dalam fikirannya sebuah gagasan untuk membentuk sebuah organisasi bagi pelajar Islam yang dapat mewadahi segenap lapisan pelajar Islam. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam sebuah pertemuan di gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta. Kawan-kawannya yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji, dan kemudian yang hadir semua sepakat untuk mendirikan organisasi pelajar Islam.[14]

Pada tanggal 30 Maret-1 april 1947 di gedung Mu'alimin Yogyakarta dilaksanakan Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Dalam kesempatan itu, Yoesdi Ghozali kembali menyuarakan gagasan tersebut. Pada saat pembahasan kepelajaran, Yoesdi Ghozali dipersilahkan untuk mempresentasikan gagasannya untuk membentuk wadah bagi pelajar Islam

---

[13] Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuas;Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: mizan,2005), p.*429.*

[14] Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia* (Yogyakarta: Panitia Daerah MuktamarXIV Pelajar Islam Indonesia, 1976). P. 22.

yang ketika itu dipimpin oleh Anton Timur Dzaelani sebagai Pemimpin Pusat GPII bagian kepelajaran.[15]

Banyaknya persetujuan dari berbagai kalangan dari para peserta kongres mengenai gagasan tersebut, maka kongres kemudian memutuskan melepas GPII Bagian Pelajar untuk bergabung dengan organisasi Pelajar Islam yang akan dibentuk. Para peserta kongres GPII yang kembali kedaerah-daerahnya masing-masing diminta agar mempermudah berdirinya organisasi khusus pelajar Islam di daerahnya.

Pada Ahad 4 Mei 1947, diadakanlah pertemuan di kantor GPII, untuk menindak lanjuti keputusan kongres dijalan Margomulyo 8 Yogyakarta. Pertemuan itu dihadiri Yoesdi Gozali, Anton Timur Djaelani dan Amien Syahri yang mewakili Bagian Pelajar GPII. Sementara itu Ibrahim Zarkasji dan Yahya Ubeid dari Pesatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS). Dari Pergabungan Kursus Islam Sekolah Menengah (PERKISEM) Surakarta diwakili oleh Multazam dari Shawabi serta Dida Gursid dan Supomo NA yang mewakili Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII) Yogyakarta.[16]

Rapat yang dipimpi oleh Yoesdi Gozali itu kemudian memutuskan berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) tepat pada pukul 10:00, 4 Mei 1947. Untuk memperingati momen pembentukan PII, maka setiap tanggal 4 Mei diperingati sebagai hari PII (HARBA PII). Karena hari itu

[15] Darban, *Sejarah Lahirnya… p. 22.*
[16] Hanan, Gerakan Pelajar …, p.58

dianggap sebagai momen kebangkitan dari agagasan yang sebelumnya sudah terakumulasi, sehingga tidak digunakan sebagai hari lahir atau hari ulang tahun.

Kata "siswa" tidak digunakan dalam penamaan organisasi PII karena berasal dari bahasa sanskerta. Selain itu, sudah ada kata "siswa" yang sudah digunakan dalam istilah "mahasiswa". Sementara itu, kata "mahasiswa" dan "pelajar" dalam bahasa Ingris memiliki terjemahan "*student*", sehingga secara implicit, PII menamakan semuanya sebagai pelajar. Tetapi, PII lebih diorientasikan sebagai organisasi untuk kelompok SD, SMP dan SMA.[17]

B. Misi Pelajar Islam Indonesia (PII)

Pelajar Islam Indonesia (PII) mempertegas peranan dan eksistensinya sebagai organisasi berbasis pelajar yang konsen terhadap pendidikan dan dakwah suatu kebudayaan. Sebagai implementasinya, PII menggariskan tujuan organisasinya adalah: "Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dalam Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia".[18]

Terdapat dua hal yang ingin dicapai dalam tujuan PII, yakni kesempurnaan pendidikan dan kesempurnaan kebudayaan.[19] Kedua poin tersebut merujuk pada Islam sebagai sumber nilai dan pandangan hidup,

[17] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 58.
[18] Nisa, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.
[19] Fauzul Azim, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.

sedangkan segenap rakyat Indonesia dan umat manusia adalah wilayah dakwahnya, sebagaimana yang disebut dalam Bab VI Pasal 7, yaitu:

1. Mendidik anggotanya menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk memahami, mengkaji, mengapresisasi dan melaksanakan ajaran serta tuntunan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
3. Mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki pandangan hidup Islami, keluasan pandangan global dan berkpribadian muslim dalam segala bidang kehidupan.
4. Mendidik anggotanya untuk memiliki dan memelihara jiwa independen yang tangguh.
5. Membina mental dan menumbuhkan apresiasi keilmuan serta kebudayaan yang sesuai dengan Islam.
6. Menumbuh-kembangkan semangat dan kemampuan anggota untuk mengikuti, menguasai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia.
7. Mengembangkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, minat dan bakat anggotanya.
8. Membantu dalam pemenuhan dan pengembangan minat, bakat dan potensi masyarakat pelajar.
9. Membela hak-hak dan mengatasi problematika pelajar.
10. Menyelenggarakan kegiatan sosial untuk kepentingan Islam dan umat islam serta manusia pada umumnya.

Sampai saat ini misi PII tidak akan terlaksana, karena kalimat yang mengawali adalah "Kesempurnaan" sedangkan patut kita ketahui bahwa tidak kesempurnaan yang bisa dicapai oleh seorang manusia selain kesempurnaan Allah SWT.[20]

[20] Nisa, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.

C. Perkembangan Pelajar Islam Indonesia (PII)

Pada tanggal 20-25 Desember tahun 1949 PII menyelenggarakan kongres pendahuluan di Yogyakarta. Poin yang dibicarakan ketika itu adalah persiapan Konferensi Besar III di Bandung pada tahun 1950 dan upaya konsolidasi PII dan melebarkan sayap gerakan dakwahnya. Hasil keputusan dari pertemuan itu adalah bahwa hanya ada satu organisasi pelajar, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII).[21]

Setelah dilaksanakannya Kongres Pendahuluan PII di Yogyakarta, pada tahun 1949 dilaksanakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI), yang mana dalam kegiatan itu PII sebagai salah satu panitia. Kegiatan KMI dihadiri oleh para ulama Indonesia yang memiliki basis masa pesantren sangat besar. Seperti K.H. Ali Maksum, K.H. Zarkasyi, utusan ulama dari Aceh Teuku Daud Beureuh, dan lain-lain. Peluang itu tidak di sia-siakan oleh PII untuk berdialog dan membicarakan strategi pelebaran dakwah PII di seluruh tanah air.[22]

Salah satu keputusan hasil dalam Kongres Muslimin Indonesia (KMI) adalah bahwa satu-satunya Organisasi Pelajar Islam adalah " Pelajar Islam Indonesia (PII)". Ketika itu PII mendapatkan momentumnya, terlebih pada saat Konferensi Besar III di Bandung tanggal 27-31 Maret tahun 1950

[21] Hanan …, p. 64
[22] Hanan, *Gerakan Pelajar …,* p. 64

merupakan tonggak sejarah bagi PII. Tiga organisasi lokal, yaitu Pelajar Islam Indonesia Jakarta Raya, PERPINDO di Aceh dan Pelajar Islam Makasar melebur dalam tubuh PII. Dengan demikian PII pada saat itu merupaka organisasi pelajar terbesar di Indonesia dengan memiliki beberapa cabang di hampir seluruh Indonesia.[23]

Setelah Partai Komunis Indonesia Bubar dan pemerintahan beralih dari Orde Lama ke Orde Baru maka PII mengubah haluannya yakni tidak lagi terjun ke kancah politik praktis tetapi kembali kepada ideologi perjuangan semula sebagai organisasi pelajar dengan mengaktulisasikan diri dalam Program GAS (Gerakan Amal Sholeh) yang terkenal dengan slogan kembali ke Masjid, kembali ke bangku sekolah dan kembali ke kampung. GAS merupakan usaha PII untuk ikut menanggulangi krisis moral yang melanda generasi muda sekaligus mengarahkan PII untuk bergiat dalam pendidikan dalam rangka membangun bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT.[24]

Sebagai organisasi massa sosial dan pendidikan, PII telah mempunyai suatu sistem latihan yang efektif bagi generasi muda yaitu :

1. Latihan Kepemimpinan (Leadership Training) bagi para anggotanya dari mulai tingkat dasar sampai tingkat lanjutan

[23] Nisa, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.

[24] Nisa, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.

2. Latihan Kejiwaan (Mental Training) dan pesantren kilat yang terbuka untuk semua generasi muda.
3. Latihan Kerja Kemasyarakatan (Perkampungan Kerja Pelajar/Pemuda) dan Brigade Pembangunan yang terbuka untuk semua generasi muda.[25]

Proses kaderisasi PII bertipologi sebagai organisasi kader sekaligus sebagai organisasi massa (pelajar). Proses kaderisasi memang peranan yang sangat penting, hal itu juga ditunjang oleh pengembangan sistem kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan kurikulum yang selalu dikembangkan. Pengembangan sistem kaderisasi sudah dimulai sejak tahun 1952 dengan nama Latihan Kader. Kegiatan yang dilakukan secara sederhana tanpa adanya konsepsi yang terencana dan tanpa adanya standarisasi yang baik. Pola kaderisasi itu terus dikembangkan baik dari segi sistem, kurikulum maupun pelaksanaannya. Dari segi pengembangan konsep, kaderisasi PII dapat dibagi kedalam dua periode yaitu sebelum tahun 1990 dan sesudah tahun 1990. Sedangkan dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi masa sebelum tahun 1985, hingga awal tahun 1990.

Kaderisasi adalah kebulatan proses yang mengarah pada terciptanya kader-kader atau anggota inti organisasi yang berlangsung mulai dari

[25] Fauzul Azim, diwawancarai oleh Ibin Sarbini, *Voice Note Recorder*, Blackbarry Serang, 17 April 2016.

rekrutmen anggota, pembinaan hingga pelaksanaan tugas-tugas, atau dalam bentuk seluruh kegiatan PII yang ada hubungannya dengan kegiatan anggota. Oleh karena itu, ada dua jenis kader yang mengikuti dan menggerakan organisasi PII. Yaitu: *Pertama,* kader material yakni mereka yang melaksanakan usaha dan program kerja dengan atau tanpa melalui *training-training* formal. *Kedua,* kader formal yaitu, kader yang mengikuti dan mempunyai kader formal PII. Seluruh kegiatan PII sesungguhnya merupakan proses kaderisasi namun secara khusus kegiatan kaderisasi dilakukan melalui *Training*. Melalui kaderisasi diharapkan.

a. Tumbuh dan berkembangnya suasana untuk berjuang di jalan Allah SWT sehingga lembaga menjadi suatu norma.
b. Berkembangnya kesadaran untuk senantiasa melaksanakan ajaran Islam hingga menjadi norma kelompok.
c. Tumbuh dan suburnya hasrat untuk selalu sukses studi sehingga setiap kader senantiasa berusaha menambah pengetahuan dan keterampilan.
d. Berkembangnya sikap saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran, keikhlasan dan keterbukaan.

e. Setip kesadaran diikuti dengan usaha-usaha yang nampak seperti kegiatan kelompok belajar, pengabdian sosial dan kegiatan kemanusiaan.[26]

[26] Hanan, Gerakan Pelajar …, p. 104